

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

A. Keterlibatan Indonesia dalam Perdamaian di Kawasan Timur Tengah

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam perdamaian internasional terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia”. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, menunjukkan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia bersifat bebas aktif serta turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

Eksistensi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian internasional dapat dilihat dalam keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955, dan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pertama KAA di Bandung. KAA tersebut kemudian menghasilkan Dasasila Bandung, yang antara lain menegaskan sikap penolakan pada penjajahan dan intervensi asing terhadap persoalan dalam negeri.¹ Konferensi Bandung ini yang menjadi cikal bakal terbentuk Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961. Indonesia juga tergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) yang diprakarsai oleh Afganistan, India, Indonesia, Mesir, dan Yugoslavia. Dalam bidang politik, Indonesia selalu berperan dalam upaya peningkatan peran GNB untuk

¹ Peter Tomaso. Perombakan Struktur Tanpa Perubahan Pimpinan Nasional (Hasil Diskusi Nasional KNIP). Dalam Muhammad Faris Alfadh, 2012. Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah. Yogyakarta: Prudent Media. Hlm. 95

menyerukan perdamaian dan keamanan internasional, proses dialog dan kerjasama dalam upaya penyelesaian damai konflik-konflik intra dan antar negara, dan upaya penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru.²

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia bahkan ikut mendirikan OKI bersama 22 negara lainnya pada tahun 1970. Keterlibatan Indonesia dalam OKI saat itu bertujuan untuk memajukan kerjasama internasional dengan negara-negara Islam. Namun demikian, kerjasama tersebut lebih berdasarkan pada piagam PBB daripada prinsip-prinsip Islam.³ Menurut Michael Leifer, keikutsertaan Indonesia dalam OKI bukan karena Indonesia merupakan negara Islam, tetapi sebagai negara yang menghargai prinsip-prinsip Gerakan Non Blok dan Konferensi Bandung. Piagam OKI menyatakan bahwa negara anggota OKI merupakan negara Islam, oleh karena Indonesia bukan merupakan negara Islam, maka Indonesia menolak untuk menandatangani piagam OKI tersebut. Meskipun begitu, OKI tetap mengizinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatannya. Dengan demikian, posisi Indonesia dalam OKI bisa dibilang cukup unik. Indonesia tidak hanya diterima sebagai satu-satunya negara bukan Islam, tetapi juga bertindak sebagai penengah dalam perseteruan diantara anggota OKI.⁴

Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada era Presiden Soekarno telah memberikan landasan kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina. Indonesia terlibat aktif dalam forum KAA (Konferensi Asia Afrika) dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Menurut Duta Besar Palestina dan Berkuasa Penuh, Farid N. Mehdawi, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dukungan

²<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Gerakan-Non-Blok.aspx> diakses pada 9 Agustus 2016

³ Muhammad Faris Alfadh, 2012. Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah. Yogyakarta: Prudent Media. hal. 99.

⁴ibid, hal. 100

yang diberikan kepada Palestina hanya sebatas retorika semata. Karena Indonesia pada saat itu baru melakukan pembangunan pasca perang sehingga tidak dapat memberikan bantuan nyata kepada Palestina.

Pada era Presiden Soeharto, pada tahun 1987, Presiden Soeharto ketua PLO (*Palestine Liberation Organization*), Yasser Arafat. Pada pertemuan tersebut, Yasser menjelaskan mengenai persiapan kemerdekaan negara Palestina dan meminta dukungan Indonesia untuk mendukung pendirian negara Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto pun memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.⁵

Pada tahun 2008, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menyelenggarakan NASSP (New Asia Africa Strategic Partnership). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan negara-negara Asia dan Afrika membahas mengenai dukungan kepada Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia juga memberikan bantuan untuk pendirian Bank berbasis Syariah dan pembangunan rumah sakit di jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza merupakan bantuan dari berbagai organisasi dan masyarakat Indonesia.⁶ Indonesia juga terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pada tanggal 8-10 Juni 2009, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Asian and Pacific on the Question of Palestine* yang bertemakan *Strengthening International Consensus on The Urgency of Achieving a Two-State Solution*. Pertemuan tersebut lalu dilanjutkan pada pertemuan *United Nations Forum of Civil Society in Support of the Palestinian People* pada tanggal 10 Juni 2009. Kedua pertemuan tersebut merupakan program dari *Committee on the*

⁵ Anak Agung Banyu Perwita, *Indonesia and The Muslim World, Islam and Secularism in The Foreign Policy of Soeharto and Beyond*, hal. 75

⁶ Ica Wulansari, *Komunikasi Internasional Indonesia untuk Palestina*, diakses dari <http://ic-mes.org/politics/jurnal-komunikasi-internasional-indonesia-untuk-palestina/> pada 1 Agustus 2016

Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (Komite Palestina) PBB dalam menjalankan mandatnya menggalang dukungan masyarakat internasional terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina.⁷

Dalam rangka mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah yang berdasarkan falsafah negara Republik Indonesia, Indonesia berupaya untuk mendorong upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York tanggal 29 November 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung Peningkatan status Palestina sebagai negara non anggota PBB dari status entitas pemantau yang diwakili PLO (Palestine Liberation Organization) melalui voting.⁸ Sebanyak 138 anggota Majelis Umum PBB mendukung, 9 anggota menolak, dan sebanyak 41 anggota abstain.

Indonesia pernah menjadi salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk berdirinya negara Palestina. Pada tanggal 16 Desember 2008, atas dorongan Indonesia, untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi No. 1950 mengenai proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik Israel dan Palestina.⁹

Konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terlihat dari kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI pada tanggal 6-7 Maret 2016. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi siap untuk membantu rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah demi

⁷ Ibid

⁸ Ica Wulansari, Komunikasi Internasional Indonesia untuk Palestina, diakses dari <http://ic-mes.org/politics/jurnal-komunikasi-internasional-indonesia-untuk-palestina/> pada 1 Agustus 2016

⁹ Ibid

terwujudnya perdamaian di Palestina, dan Indonesia siap melakukan langkah konkret untuk menghentikan penjajahan dan kesewenangan Israel di Al-Quds.¹⁰

Hal yang paling mencolok dari kontribusi Indonesia terhadap perdamaian di Timur Tengah adalah dengan adanya pasukan Indonesia di Lebanon, Sudan Selatan, dan Darfur.¹¹ Peran Indonesia dalam konflik di Timur Tengah yang lainnya adalah Indonesia ikut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menangani krisis di Lebanon Selatan pada akhir tahun 2006, sekaligus menawarkan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB melalui pengiriman tentara perdamaian di bawah Kontingen Garuda XXIII-A untuk bergabung dengan *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL)¹², dan telah menempatkan sejumlah personel Kontingen Garuda di berbagai penempatan maupun unit kerja di Lebanon. Sampaisaat ini, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang pasukan terbanyak diantara negara anggota PBB lain di UNIFIL. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari UNIFIL karena keberhasilannya mencegah kontak senjata antara Angkatan Bersenjata Lebanon dengan Angkatan Bersenjata Israel pada tahun 2010.

Gambar 1.1 Jumlah Personel Kontingen Garuda¹³

¹⁰<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160307105257-106-115733/jokowi-serukan-rekonsiliasi-demi-perdamaian-palestina/> diakses pada 1 Agustus 2016

¹¹ Sidik Jatmika. (2016, Agustus 9), Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Timur Tengah. (Annisa, wawancara)

¹² Muhammad Faris Alfadh, 2012. Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah. Yogyakarta: Prudent Media. Hal. 101

¹³ Benedicta Trixie Ariestianti, TNI dan Perwujudan Perdamaian Dunia. *Media Informasi Kementerian Pertahanan WIRA*

**Number of Garuda Contingent Personnel
On World Peacekeeping Missions until Mei 2014¹**

No	The Name of Peacekeeping Mission	Country of Mission	The Number of Personnel
1	United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)	Lebanon	1.287
2	United Nations Organizations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO)	Congo	185
3	Mission Des Nations Unies Pour la Stabilization en Haiti (MINUSTAH)	Haiti	154
4	United Mission in Darfur (UNAMID)	Darfur	149
5	United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA)	Sudan	2
6	Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)	Morocco	2
7	United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)	Sudan	3
8	United Nations Mission in Liberia (UNMIL)	Liberia	1
9	International Monitoring Team (IMT) Misi Perdamaian Non-PBB	South Filipines	10
Number of Garuda Contingent Personnel			1.783

Sampai saat ini, Indonesia masih aktif mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara konflik di Timur Tengah, terutama Lebanon, Sudan Salatan, dan Darfur, dan Indonesia terus berupaya untuk menambah personel dalam pasukan perdamaian demi terwujudnya perdamaian dunia. Bahkan pada 20 Marret 2012, usaha Indonesia dalam mengirimkan Kontigen Garuda ini mendapatkan apresiasi khusus dari Sekjen PBB, Ban Ki Moon dalam peninjauan langsung ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul.

B. Hubungan Indonesia Dan Arab Saudi

1. Sejarah Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi udah terjalin dalam kurun waktu yang cukup lama. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi dimulai pada tanggal 1 Mei 1950. Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dimulai dengan usaha rakyat Indonesia untuk mendapat pengakuan

kemerdekaan Republik Indonesia. Raja Abdul Aziz Al-Saud telah memberikan Surat Pengakuan Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Republik Indonesia pada 21 November 1947.¹⁴

Indonesia membuka Kantor Perwakilan di Timur Tengah, tepatnya di Kairo, Mesir, pada 7 Agustus 1949. Pada tahun 1950, Kantor Perwakilan RI ini ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar yang terakreditasi untuk Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Kemudian Indonesia mendirikan Kedutaan Besar untuk Arab Saudi di Jeddah pada 1964. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi tersebut kemudian dipindahkan ke Riyadh pada tanggal 29 September 1985. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jeddah kemudian diubah statusnya menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.¹⁵ Hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengalami perkembangan yang semakin membesar karena Indonesia dan Arab Saudi sendiri memiliki kesamaan yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan bersama sampai dengan saat ini.

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Bilateral Indonesia dan Arab Saudi

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya Indonesia dan arab saudi telah bekerjasama sejak tahun 1950 hingga saat ini. bentuk-bentuk kerjasama Indonesia- Arab Saudi salah satunya meliputi Kerjasama bidang politik, kerjasama bidang sosial budaya, kerjasama bidang pendidikan dan kerjasama haji.

¹⁴Suranta Abd. Rahman, Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947, diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUqOXI95zNAhVn2qYKHenXAJEQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwacana.ui.ac.id%2Findex.php%2Fwjhi%2Farticle%2Fdownload%2F210%2F200&usg=AFQjCNGshTnS3LiXpiWRq-1Xmct_4mHAzA&sig2=4jmnEbSuVdzxnLsSK5-Lsg&bvm=bv.124088155,d.dGY pada tanggal 10 Juni 2016, Jam 15.00 WIB

¹⁵Faiz Resha Majid, Dinamika Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia di Arab Saudi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

a. Kerjasama bidang politik

Pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara-negara Arab telah memberikan dampak yang baik bagi kedua negara dalam bidang politik. Arab Saudi memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 21 November 1947. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi terjalin sejak tanggal 1 Mei 1950. Indonesia membuka Kantor Perwakilan di Timur Tengah, tepatnya di Kairo, Mesir, pada tanggal 7 Agustus 1949. Kantor Perwakilan Republik Indonesia ini ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia yang juga terakreditasi untuk Arab Saudi, Iran, dan Pakistan pada tahun 1950.

Pada tahun 1964, Indonesia baru membuka kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi di Jeddah. Kedutaan Besar Republik Indonesia ini selanjutnya dipindahkan ke Riyadh pada tanggal 1985. Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah kemudian diubah statusnya menjadi Konsulat Jendral Republik Indonesia. Sedangkan Arab Saudi membuka kantor Perwakilannya pada tahun 1950 dan kemudian secara resmi mendirikan Kedutaan Besar di Jakarta pada tahun 1955.¹⁶

Hingga saat ini, Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin kerjasama bilateral dan juga mengembangkan kerjasama di berbagai forum, baik forum regional maupun internasional, seperti PPB, Badan-Badan PPB, GNB (Gerakan Non Blok), OKI, dan juga G20.

1. Mekanisme Bilateral

Keinginan Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kerjasama bilateral terlihat saat Sidang Komisi Bersama ke-9 antara Indonesia dan Arab Saudi pada tanggal 26-27 April 2012 di Bali. Sidang Komisi Bersama tersebut menghasilkan *Agreed Minutes* yang ditandatangani oleh

¹⁶ Ibid

ketua delegasi Indonesia, Dirjen Asia Pasifik Kemlu, Duta Besar Yuri O. Thamrin, dan Deputi Urusan Ketenagakerjaan Arab Saudi, Ahmad Bin Saleh Al Humaidan. Pertemuan tersebut membahas berbagai peningkatan kerjasama bilateral melalui dua komisi kerja, yaitu Komisi Kerja 1 untuk isu-isu bidang ekonomi, dan Komisi Kerja 2 untuk isu-isu spesifik lainnya.

Komisi Kerja 1 di bidang ekonomi, dibahas berbagai hal seperti peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, industry dan ekonomi, khususnya di bidang usaha kecil dan menengah, investasi, bea cukai, serta kerjasama financial. Potensi kerjasama di berbagai sector juga dibahas dalam pertemuan ini, seperti pertambangan, energy, dan kelistrikan, kelautan dan perikanan, pertanian, kerjasama standarisasi, pariwisata, kerjasama bidang pos, informasi, serta komunikasi dan telekomunikasi. Komisi ini juga membahas kerjasama air yang meliputi manajemen air, pengawasan polusi air, teknologi pemurnian air, dan pendaurlangannya. Sedangkan Komisi Kerja 2 yang membahas isu-isu spesifik membahas kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan, keislaman, kesehatan pengawasan makanan dan obat-obatan. Komisi ini juga membahas kerjasama dalam bidang keimigrasian dan kekonsuleran, lingkungan dan meteorologi, masalah ketenagakerjaan sector formal dan kepemudaan serta olahraga.¹⁷

2. Kunjungan Kenegaraan

Pada 11-12 September 2015, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, telah menghasilkan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi ke jenjang yang lebih tinggi, yakni dengan adanya komitmen kuat dari kedua pemimpin negara untuk meningkatkan hubungan bilateral terutama dibidang investasi energy dan perminyakan serta pengembangan sector pariwisata di Indonesia. selain itu, KBRI juga telah

¹⁷RI-Arab Saudi Sepakat Tingkatkan dan Perluas Kerjasama Bilateral, diakses dari <http://indonesia.go.id/en/ministries/11040-ri-arab-saudi-sepakat-tingkatkan-dan-perluas-kerja-sama-bilateral>, tanggal 8 Juni 2016.

berhasil memfasilitasi penandatanganan deklarasi Dialog Strategis Indonesia - Gulf Cooperation Council (GCC) oleh menteri luar negeri RI dan Sekjen GCC pada 12 September 2015, disela-sela kunjungan Presiden RI. Lalu Pada 22 Oktober 2015, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir berkunjung ke Indonesia yang sekaligus menjadi kunjungan pertama kali Menteri Luar Negeri Arab Saudi sejak 45 tahun terakhir.¹⁸

Pada 18 Januari 2016, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengunjungi Arab Saudi untuk menyampaikan pesan damai dari Presiden Joko Widodo. Pada 7 Maret 2016, disela-sela KTT OKI, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari menteri luar negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir, guna membahas kesepakatan kuota haji. Pada 22 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kemormatan Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud. Kunjungan tersebut membahas mengenai kerjasama ekonomi antar Indonesia dan Arab Saudi.¹⁹

3. Perjanjian Kesepakatan Dalam Bidang Politik

Perjanjian Kesepakatan dalam bidang politik antara Indonesia dan Arab Saudi dilakukan di Jeddah, pada tanggal 24 November 1970. Perjanjian politik tersebut lalu diratifikasi melalui UU No.9 tanggal 18 September 1971 LN No.77 tambahan LN No.2972. Perjanjian tersebut berbentuk *Treaty of Friendship Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia* (Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi).²⁰ Dalam kesepakatan ini, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk tidak saling mengintervensi atas

¹⁸ INI PENCAPAIAN KINERJA KBRI RIYADH 2015, diakses dari http://kemlu.go.id/riyadh/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/INI_CAPAIAN_KINERJA_KBRI_RIYADH_TAHUN_2015.aspx, pada 8 Juni 2016

¹⁹ Pangeran Arab Saudi Ingin Tingkatkan Investasi di Indonesia, diakses dari <http://www.suara.com/news/2016/05/23/013100/pangeran-arab-saudi-ingin-tingkat-investasi-di-indonesia>, pada 6 Juni 2016

²⁰ <http://portal.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/arabsaudi.htm> diakses pada 8 Juni 2016

kehendak politik dari masing-masing negara. Kerjasama politik antara Indonesia dan Arab Saudi pada umumnya untuk mempererat hubungan antar kedua negara berdasarkan pada system politik luar negeri dari kedua negara.

b. Kerjasama Bidang Sosial Budaya

Hubungan Antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang social dan budaya sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.

1) Kerjasama di Bidang Sosial

Belum adanya MoU dalam bidang kerjasama social antara Indonesia dan Arab Saudi, membuat kedua negara mengupayakan peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di bidang social. Salah satunya adalah melalui kunjungan Menteri Sosial RI yang telah berkunjung ke Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 23-31 Desember 2012 dan bertemu dengan Menteri Sosial Arab Saudi.²¹ Pertemuan Menteri Sosial RI dan Menteri Sosial Arab Saudi membahas beberapa peluang kerjasama antar kedua kementerian, diantaranya saling kunjung antar pejabat kedua kementerian guna berbagi pengalaman serta melihat langsung berbagai program kegiatan layanan social di masing-masing negara, kerjasama dibidang bantuan social baik secara bilateral maupun melibatkan pihak ketiga seperti IDB, Saudi Fund for Development, Rabithoh Alam Islami, dan lain sebagainya.²²

Bantuan social dari Arab Saudi diantaranya pembangunan 850 masjid di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2003-2015 atau dalam kurun waktu 15 tahun oleh Raja Arab Saudi

²¹Faiz Resha Majid, DINAMIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2015.

²² Ibid

melalui Yayasan Makkah Al-Mukaramah perwakilan Indonesia. Selain membangun masjid, bantuan social lainnya, seperti hewan kurban, buka puasa bersama dan juga pembinaan 20 ribu anak yatim diseluruh Indonesia.²³ Dalam kurun waktu 2004-2014, Pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan social kepada korban tsunami Aceh berupa pembangunan 1.500 rumah, pengeboran sumur, pembangunan rumah sakit, klinik kesehatan, panti yatim piatu serta renovasi Masjid Raya Baiturrahman.²⁴ Pada 2013, kerajaan Arab Saudi melalui Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, Mustofa Ibrohim Almubarak menyerahkan bantuan kurma sebanyak 10 ton untuk korban gempa bumi di Aceh Tengah dan Bener Meriah serta masyarakat Aceh melalui kantor penghubung Aceh di Jakarta.²⁵

Pada Juni 2016, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menerima hibah dari Kedutaan Besar Arab Saudi dan dermawan Arab Saudi. Bantuan tersebut berupa buku sebanyak 245 paket yang setiap paketnya terdiri dari 15 buku keagamaan, 4 buku berbahasa Indonesia dan 1 Al-Qur'an, kurma sebanyak 1,5 ton, dan juga paket buka puasa sebanyak 2.267 paket yang akan dibagikan kepada masyarakat luas.²⁶

2) Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi di Bidang Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan, Indonesia dan Arab Saudi belum memiliki perjanjian kerjasama (MoU).Meskipun belum memiliki perjanjian di bidang kebudayaan, kerjasama dalam

²³Raja Salman Bangun 850 Masjid di Indonesia, diakses dari <http://fokusjabar.com/2015/03/23/raja-salman-bangun-850-masjid-di-indonesia/>, tanggal 8 Juni 2016

²⁴Program Bantuan Kemanusiaan oleh Kerajaan Arab Saudi, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Program_bantuan_kemanusiaan_oleh_Kerajaan_Arab_Saudi, pada tanggal 6 Juni 2016

²⁵ Relawan Gayo Minta Bantuan 10 Tin Kurma Arab Saudi Disalurkan Tepat Sasaran, diakses dari <http://atjehpost.co/artikel1/read/Relawan-Gayo-minta-bantuan-10-ton-kurma-Arab-Saudi-disalurkan-tepat-sasaran-58751>, tanggal 6 Juni 2016

²⁶<http://www.umm.ac.id/id/umm-news-5438-umm-siap-distribusikan-kurma-bantuan-arab-saudi.html> diakses pada 11 Juni 2016

bidang budaya antar kedua negara mulai terlaksana, seperti melalui undangan untuk hadir ataupun menampilkan kebudayaan Indonesia di berbagai acara atau festival budaya yang diselenggarakan oleh Arab Saudi.

Melalui acara seperti Festival Budaya Nasional Tahunan Al-Janadiriyyah, yang menyuguhkan berbagai pertunjukan budaya atau karya seni Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya, secara rutin, pihak penyelenggara mengundang tokoh-tokoh budaya Indonesia untuk hadir dalam festival tersebut. Indonesia bahkan pernah mendapat kehormatan untuk menampilkan kelompok penari pria yang membawakan tarian tradisional Aceh dan Padang. Di antara para tokoh atau cendekiawan Indonesia yang pernah diundang dan hadir dalam acara tersebut, antara lain: Dr. Amien Rais, Prof. Zuhaili, mantan Menristek RI, dan Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA, Rektor Universitas Ujung Pandang dan lain sebagainya.²⁷

Selain di festival budaya Al- Janadiriyyah, Indonesia juga pernah ikut acara *Global Food Festival* yang diwakili oleh siswa/siswi Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) pada 18 Januari 2014, dan acara *International Children's Day Festival* di King Fahad Culture Center Riyadh pada tanggal 17-21 November 2013.²⁸

Mahasiswa Indonesia di Universitas King Saud yang tergabung dalam Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengikuti pameran budaya dua tahunan yang diadakan Universitas King Saud yang dilaksanakan pada 16-19 Maret 2015.

Gambar 1.2. Pertunjukan Tari Saman oleh PPMI saat pembukaan Pameran Kebudayaan di Universitas King Saud

²⁷Faiz Resha Majid, DINAMIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2015, *Op.cit*

²⁸ ibid



Sumber : <http://manhajuna.com/partisipasi-mahasiswa-indonesia-dalam-pameran-budaya-2015-di-ksu/>

Dalam acara pembukaan yang dihadiri Rektor Universitas King Saud Prof. DR. Badron bin Abdurrahman Al-Umar, mahasiswa Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menampilkan tari Saman dari Aceh. Selain tari, dua mahasiswa Indonesia memeragakan bela diri pencak silat. Rektor Universitas King Saud juga didaulat untuk melakukan seremoni pemotongan nasi tumpeng dan membubuhkan tandatangannya di buku tamu.²⁹

c. Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi di Bidang Pendidikan

Dasar dari kerjasama di bidang pendidikan adalah perjanjian kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Pengajaran Islam yang telah ditandatangani Indonesia dan Arab Saudi, pada 19 Mei 1981 di Riyadh, yang Diratifikasi melalui Keppres No.31 tanggal 14 Juli 1981 LN No.33. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat hubungan persaudaraan juga kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan pengajaran Islam.³⁰

²⁹<http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Di-Tengah-Ujian-Mahasiswa-Indonesia-Tetap-Berpromosi-di-Arab-Saudi.aspx> diakses pada 8 Juni 2016

³⁰http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/856_SAU-1981-0005.pdf diakses pada 5 Juni 2016

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara, antara lain adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama antar lembaga keislaman di kedua negara, pengiriman ulama-ulama atau dosen dari Arab Saudi ke Indonesia dalam rangka dakwah dan pelatihan bahasa Arab, serta saling undang untuk menghadiri suatu kegiatan yang diadakan oleh salah satu negara, dan juga pemberian beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa kedua negara di berbagai universitas Islam yang ada di kedua negara dan lain sebagainya.³¹

Dalam Sidang Komisi Bersama ke-9, Indonesia menyampaikan penghargaan atas beasiswa yang telah diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Arab Saudi. Indonesia juga menawarkan adanya pertukaran kunjungan antar universitas kedua negara dan memberi usulan agar Indonesia dapat mendirikan Pusat Studi Indonesia pada universitas di Arab Saudi. Selain itu, Indonesia juga telah mengusulkan adanya kesepakatan saling pengakuan sertifikat perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh kedua negara.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh bersama empat universitas di Indonesia mengikuti pameran *The 3rd International Exhibition and Conference for Higher Education (IECHE)* pada 2012. Keempat universitas tersebut adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran yang diselenggarakan pada 17-20 April 2012 bertujuan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Arab Saudi yang belajar di Indonesia, dan sebaliknya, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di

³¹Faiz Resha Majid, DINAMIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2015, *Op.cit*

Arab Saudi, yang hingga 2012 telah berjumlah 507 mahasiswa melalui program beasiswa dari Arab Saudi.³²

C. Kerjasama Indonesia Dan Iran

Indonesia dan Iran merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan telah menjalin hubungan baik sejak lama. Dalam hal kerjasama, Indonesia dan Iran merupakan mitra diberbagai bidang kerjasama seperti bidang politik, social budaya, dan pendidikan.

1. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dan Iran

Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Iran dimulai pada tahun 1950. Pada saat itu, Kedutaan Republik Indonesia masih terletak di Kairo, Mesir. Pada akhir 1960, Kedutaan Republik Indonesia dinaikkan statusnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menunjuk M. Bachmid sebagai Duta Besar LBBP RI yang pertama. Hubungan Indonesia dan Iran sampai dengan saat ini telah berjalan dengan baik, karena Indonesia dan Iran memiliki kesamaan dan ketertarikan akan sesuatu yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan Indonesia dan Iran telah berjalan dengan baik, baik dibidang Politik, social budaya, maupun pendidikan.

2. Kerjasama Bidang Politik

a. Mekanisme Bilateral

³²<http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/05/indonesia-ikuti-pameran-pendidikan-di-arab-saudi-305-305-305> diakses pada 11 Juni 2016

Keinginan Indonesia dan Iran dalam meningkatkan kerjasama bilateral terlihat dari Nota Kesepahaman antara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran tentang Pementukan Komite Konsultasi Bilateral. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani pada 10 Mei 2003.³³ Nota tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga mengembangkan kerjasama antar ke dua negara, serta untuk meningkatkan konsultasi dan pertukaran pandangan terhadap berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran telah melakukan Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral (KKB) keempat RI – Iran ke-4 di Jakarta pada 23 November 2010. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran membahas kerjasama bilateral di berbagai bidang. Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral Indonesia – Iran yang ke-5 berlangsung di Teheran, tanggal 28-29 Mei 2013. Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Yuri O. Thamrin dan Deputy Menteri Luar Negeri Iran urusan Asia dan Oseania, Seyed Abbas Araghchi. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan atas perkembangan hubungan bilateral antar kedua negara, serta mengidentifikasi peluang kerjasama dan juga menyepakati langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

3. Kerjasama Bidang Sosial Budaya

a. Kerjasama di Bidang Sosial

Hubungan Indonesia dan Iran dalam bidang social berjalan dengan baik. Dalam bidang social, pemerintah Indonesia dan Iran telah membuat Nota Kesepahaman antara Kementerian

³³http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4784_IRN-2003-0016.pdf diakses pada 12 Juni 2016

Sosial Republik Indonesia dan Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF) Republik Islam Iran tentang Kesejahteraan Sosial dan Kemanusiaan. Nota Kesepemahaman yang di tandatangani pada 26 Desember 2011 ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama dalam bidang kesejahteraan social dan kemanusiaan, menekankan pada dukungan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dan kelompok marjinal khususnya anak yatim piatu dan perempuan kepala keluarga.³⁴

Hubungan social antara Indonesia dan Iran dapat dilihat dari kunjungan para isteri Duta Besar dan Diplomat yang berada di iran termasuk Indonesia ke kota Tabriz, Provinsi Azrbaijan, Iran, pada 12 Maret 2013. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan sumbangan kepada isteri Menteri Luar Negeri Iran, Madam Zahra Rad Salehi bagi korban gempa bumi yang terjadi di kota tersebut. Selain menyerahkan sumbangan, para isteri Duta Besar dan Diplomat asing tersebut juga menyaksikan dari dekat pembangunan kembali pemukiman penduduk serta memberikan motivasi kepada korban gempa bumi. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan dua tim relawan ke lokasi kejadian gempa, yaitu Dompok Duafa dan Aksi Capat Tanggap (ACT).

Setelah mengunjungi korban gempa bumi, ibu-ibu Isteri Duta Besar dan Diplomat Indonesia yang tergabung dalam Darma Wanita Persatuan (DWP) mengunjungi panti asuhan yang mengasuh 100 anak yatim dan membiayai pengobatan berjalan bagi sekitar 1.500 anak cacar di Teheran, pada 11 November 2011. Dalam kunjungan tersebut, DWP mempromosikan Indonesia dan juga membagikan bingkisan berupa tas sekolah, buku dan alat tulis, lemari es, dan juga bantuan financial sebagai tanda kepedulian dan berbagi dari KBRI Teheran kepada warga panti.

³⁴http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1356_IRN-2011-0049.pdf diakses pada 12 Juni 2016

b. Kerjasama di Bidang Budaya

Kerjasama Indonesia dan Iran tertuang dalam Persetujuan Kebudayaan antara Indonesia dan Iran pada 27 April 1971 dan disahkan melalui Keppres No.46 Tahun 1971 tanggal 20 Juli 1971 Lembaran Negara No.49.³⁵ Nota persetujuan ini membahas mengenai keinginan kedua negara untuk memajukan dan saling memahami serta menghormati sejarah budaya masing-masing negara. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran telah membuat Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Program Pertukaran Budaya Tahun 2012-2014, yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2012 di Jakarta.³⁶ Pengaturan tersebut dibuat untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada antara Indonesia dan Iran serta memperkuat dan mengembangkan hubungan bilateral di bidang budaya.

Beberapa bentuk kerjasama di bidang budaya antara Indonesia dan Iran terlihat dari keikutsertaan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam memeriahkan festival tahunan Ramadhan di Teheran. Festival yang berlangsung pada tanggal 16 Juli 2013 tersebut Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) melakukan buka bersama dengan anak-anak yatim piatu dan pengurus panti asuhan dan memberikan souvenir kepada mereka. Indonesia juga membuka stan yang menyediakan kue-kue khas Indonesia secara gratis dan menjual berbagai kerajinan tangan khas Indonesia.

Pada 24-26 Mei 2014, Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) berpartisipasi dalam Festival Budaya di Universitas Tehran. Pelajar Indonesia membuka stan yang berisikan buku-buku yang

³⁵http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3276_IRN-1971-0003.pdf diakses pada 13 Juni 2016

³⁶http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1263_IRN-2012-0050%20t.pdf diakses pada 13 Juni 2016

menggambarkan potret keindahan alam Indonesia dan tujuan wisata Indonesia. Selain itu, mahasiswa Indonesia juga menggunakan pakaian adat khas Indonesia dan juga tersedia berbagai produk kerajinan tangan seperti ukiran kayu, kain tenun, wayang kulit dan alat music angklung, serta ada juga makanan khas Indonesia. Pada 26 Februari – 2Maret 2016, Institute 24 Qesm dan AIPRO Training Center Indonesia mengadakan kursus masakan Asia. Bondan Pambudi, seorang Chef asal Indonesia berkesempatan menjadi pengajar masakan khas Indonesia di kursus tersebut. Selama mengajar, Chef Bondan menyisipkan informasi mengenai adat istiadat dan budaya asal Indonesia.

4. Kerjasama bidang Pendidikan

Dasar kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dan Iran terdapat dalam Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran pada 29 Desember 1958. Pemerintah Indonesia dan Iran juga menandatangani Momorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengenai Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik.³⁷ Dalam memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada tahun 2015 ini membahas mengenai keinginan Indonesia dan Iran untuk memperkuat hubungan persahabatan bilateral dengan kerjasama yang lebih erat dalam bidang pendidikan dan pelatihan di antara Indonesia dan Iran.

Kerjasama Indonesia dan Iran di bidang pendidikan diantaranya terlihat dari diadakannya kuliah umum oleh KBRI yang bekerjasama dengan Universitas Teheran pada 22 September 2013 yang dihadiri oleh sekitar 200 orang yang dari mahasiswa lokal maupun Indonesia yang sedang

³⁷http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5792_IRN-2015-0080.pdf diakses pada 13 Juni 2016

menempuh studi di kampus lain. Pada 19 Mei 2014, Universitas Teheran mewisuda 3 mahasiswa Indonesia, yakni Siti Fatimah Mochaamad program S.3 bidang studi Ilmu Politik, Nurmin program S.2 bidang studi Kurikulum Pendidikan, dan Halimatussa'diyah program S.1 bidang studi Arsitektur. Mahasiswi Indonesia yang berkuliah di beberapa universitas di Iran berjumlah 200 orang yang terdiri dari 148 orang di kota Qom, 10 orang di Teheran, 8 orang di Esfahan, 7 orang di Gorgan, 14 orang di Mashhad dan 13 orang di Qeshm.

Pada 26 Mei 2015, Delegasi Indonesia yang terdiri dari beberapa Profesor Universitas Hasanuddin Makassar telah bertemu dengan Prof. Dr. Mohammad Bagher Ghahramani, Wakil Rektor bidang Hubungan Internasional Universitas Teheran. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia bermaksud untuk menjajaki kerjasama dengan Universitas Teheran yang dapat diawali dengan saling kunjung guru besar dan dosen pada seminar atau konferensi baik yang diselenggarakan oleh Indonesia ataupun Iran, serta pelatihan dan pertukaran mahasiswa khususnya program doctor. Sebagai langkah awal, Universitas Teheran akan mengirimkan konsep Memorandum Saling Pengertian kepada Universitas Hasanuddin yang mencakup berbagai bidang termasuk bidang penelitian dan keinginan untuk melaksanakan program atau proyek bersama.